

HEGEMONI SOSIAL DAN POLITIK IDENTITAS PUTRA DAERAH JAMBI

Bahrul Ulum, St. Raudhatul Jannah,
Mohd. Arifullah

Institut Agama Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi | Jl. Lintas Ma.Bulian KM. 16
Simp.Sei Duren, Jambi Luar Kota. Muaro Jambi 361361
irul70@yahoo.com

Abstract: The article describes social hegemony and political domination of local people identity in Jambi. As elsewhere in Indonesia, Jambi is composed of locals and migrants. There is apparent hegemonic contestation between locals and migrants in Jambi. Migrants seems well-fit in Jambi and play significant role in urban context. In contrast, with exception of people of Kerinci and Malayu Jambi, locals seems to be marginalized especially people from Anak Dalam tribe who still hold on their primordial tradition. In political realm, locality and primordial sentiments still play major role during regional political election. The structure and use of politics of identity in Jambi is manifested by the occurrence of conflict of interest and sectoral ego which employs three main power instruments; bureaucracy, religion ad law.

Keywords: Locals and migrants, conflict, political hegemony, social domination

Abstrak: Artikel ini menggambarkan hegemoni sosial dan dominasi politik identitas putra daerah di Provinsi Jambi. Masyarakat Jambi terdiri dari warga pribumi dan pendatang. Hegemoni di masyarakat Jambi antara penduduk pribumi dan pendatang, secara kasat mata, kalangan pendatang tidak mengalami masalah sosial, penduduk pendatang justru memainkan peran penting di pusat-pusat perkotaan, sementara kebanyakan penduduk pribumi, kecuali Suku Kerinci dan Suku Melayu Jambi, menempati posisi yang agak termarginalkan, terutama Suku Anak Dalam yang masih terlihat enggan untuk mengakomodir kemajuan dalam kehidupan mereka yang lestari. Dalam dimensi politik, isu kedaerahan ataupun sentimen primordialisme dalam kehidupan masyarakat Jambi sangat kentara. Bangunan pola operasionalisasi politik identitas dapat ditemukan pada berbagai realitas yang terjadi pada masyarakat Jambi yang ditunjukkan dari banyaknya benturan

kepentingan (*conflic of interest*) dan fenomena ego sektoral dengan menggunakan tiga instrumen kuasa utama, yaitu (a) kuasa pemerintahan; (b) kuasa agama; (c) kuasa hukum.

Kata Kunci : Putra daerah, hegemoni politik, dominasi sosial.

Pendahuluan

Pemberlakuan UU No. 22/1999 tentang otonomi daerah telah mendorong penguatan sentimen kedaerahan, bahkan banyak aktor politik lokal maupun nasional secara sadar menggunakan isu kedaerahan dalam *power-sharing*.¹ Otonomi daerah pasca reformasi jelas sekali telah membawa penguatan ego kedaerahan sebagai bentuk kelegaan terhadap sistem yang selama ini mengekang dan sentralistik. Politik identitas² yang irrasional, kontraproduktif dan berbasis pada sentimen etnis telah mengental dan menjadi pilihan “rasional” dalam politik lokal.

Beberapa kasus pemilihan pemimpin lokal di Provinsi Riau, Kalimantan Tengah, Kalimantan Barat, hingga Irian Jaya secara real memperlihatkan ampuhnya sentimen rasial sebagai alat politik untuk membungkam entis politik minoritas lain, dengan mangatasnamakan putra daerah, yang memiliki kewenangan dan hak istimewa sebagai penguasa.³ Kontestasi politik di Provinsi Jambi juga tidak luput dari bentuk-bentuk politik identitas di atas. Proses pemilihan pemimpin daerah (Gubernur, Walikota, Bupati), pimpinan lembaga termasuk lembaga pendidikan seperti pemilihan Rektor, hingga unit politik terkecil sekalipun yang terselenggara di Provinsi Jambi tidak luput dari politik identitas yang selalu mengedepankan hegemoni satu etnik atas etnik yang lain. Klaim sebagai putra daerah seakan menjadi kelayakan sosial-politik yang tidak dapat ditawarkan dengan menghadapkan dua oposisi “putra

¹ Muhtar Haboddin, “Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal”, dalam *Jurnal Studi Pemerintah*, Vol. 3, No. 1 Februari, 2014: 109-126, 110.

² Politik identitas pertamakali dijelaskan oleh LA. Kauffman berdasarkan pelacakan terhadap gerakan anti kekerasan mahasiswa *The Student Nonviolent Coordinating Committee* (SNCC) yang memperjuangkan hak-hak sipil di Amerika Serikat awal 1960-an. LA. Kauffman, “The Anti-Politics of Identities” dalam *Socialist Review*, No. 1 Vol. 20 (Jan-March, 1990), 67-80.

³ Muhtar Haboddin, “Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal”, 111.

daerah Jambi” dan “bukan putra daerah Jambi”. Isu etnik menjadi prioritas ketimbang visi pembangunan daerah. Tak dapat diragukan kemudian konstruksi “kami putra daerah” dan “kamu bukan” menjadi penentu dalam transaksi politik dalam pertarungan antara kelompok etnik. Kenyataan ini telah menjadi pengalaman subjektif kalangan subaltern yang terpinggirkan.

Kenyataan di atas dinyatakan oleh Teun A. Van Dijk sebagai proses dominasi, diskriminasi dan hegemoni.⁴ Karena itu pula Akhil Gupta dan James Ferguson mengemukakan pentingnya multikulturalisme dalam kehidupan sosial berbangsa.⁵ Demikian pula Michelle Harris, Bronwyn Carlos & Evan Poata-Smith, yang menyokong upaya untuk melampaui politik identitas yang dapat berujung pada rasisme.⁶ Pandangan senada dikemukakan oleh Martin Lukito Sinaga yang menunjukkan pentingnya untuk melampaui politik identitas dengan mengajukan proses dinamika identitas yang lebih luas dan terbuka, hingga mendorong proses pengayaan identitas dengan berbagai wacana sosial mutakhir.⁷

Namun pada sisi lain, Tufyal Choudhury justru melihat urgensi identitas dalam meningkatkan solidaritas komunitas, seperti yang terdapat di kalangan muslim. Politik identitas menurutnya dapat dijadikan sebagai instrumen pemberdayaan internal sebuah komunitas.⁸ Pandangan ini mendapat dukungan dari Ahmad Syafi'i Ma'arif yang memposisikan politik identitas dalam kaitan luas dengan masalah etnisitas, agama, ideologi dan

⁴ Teun A. Van Dijk, “Analyzing Racism Through Discourse Analysis: Some Methodological Reflections”, <http://www.discourses.org/OldArticles/Analyzing%20racism%20through%20discourse%20analysis.pdf>, 97. Diakses 18 Mei 2016.

⁵ Akhil Gupta & James Ferguson, “Beyond “Culture”: Space, Identity, and the Politics of Difference” dalam *Cultural Antropology*, Vol. 7, No. 1 1992: 6-23.

⁶ Michelle Harris, Bronwyn Carlos & Evan Poata-Smith (Eds.), *The Politics of Identity: Emerging Indigeneity*, (Sydney: UTSePress, 2013), 5-6.

⁷ Syafi'i Maarif, *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita*, (Jakarta: Democracy Project, 2012), 41.

⁸ Tufyal Choudhury, *The Role of Muslim Identity Politics in Radicalisation (a Study in Progress)*, (London: Departement Communities and Local Government, 2007), 4.

kepentingan-kepentingan lokal oleh sebagian elit dengan mengatasnamakan keadilan.⁹

Melihat perbedaan pandangan di atas, ada kesulitan untuk memotret fenomena kedaerahan dengan menggunakan pandangan subjektif, hingga pertanyaan tentang (misalnya) apakah politik identitas senantiasa berdampak negatif atau sesungguhnya memiliki nilai positif yang perlu terus dipertahankan? Menjadi sulit untuk dijawab. Untuk itu, dibutuhkan barometer yang lebih objektif untuk menelisik fenomena di atas. Dalam hal ini penulis memilih kosmopolitanisme sebagai barometer, mengingat kosmopolitanisme memiliki landasan kuat dalam moralitas universal (*moraluniversalist*) yang mengajarkan bahwa semua manusia apapun perbedaannya harus tunduk pada standar-standar moral yang sama. Di mana batasan-batasan yang membedakan antar bangsa, negara, budaya atau sosial-kemasyarakatan secara moral tidaklah relevan.¹⁰

Sejarah Sosial-Budaya Masyarakat Melayu Jambi

Budaya bangsa Melayu telah berkembang sejak 5000 tahun lalu, tepatnya ketika orang *Australoid* (*Malayo-Polinesia*) memasuki wilayah Asia Tenggara dan mulai membangun sistem kemasyarakatan dan ekonomi. Menurut Coedes, orang Melayu awal banyak menerima masukan budaya luar, terutama India, berdasarkan kuatnya pengaruh India dalam budaya Melayu dalam bentuk animisme, politeisme; dewa kesuburan, serta pandangan mitologi yang menghadapkan kekuatan gunung dan lautan, kekuatan angin dan air, sertapengaruh Hindu yang kentara dalam budaya Melayu awal.¹¹

Memasuki abad ke-7 M., orang Melayu mulai terbentuk komunitasmassal yang terwadahi dalam kerajaan Sriwijaya, yang kemudian berubah menjadi (San-fo-tsi/ Melayu) ketika ibu kotanya

⁹Ahmad Syafii Maarif, *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita*, 3.

¹⁰ Lebih jauh rujuk dalam Kwame Appiah, *Cosmopolitanism Ethics in a World of Strangers*, (London: Penguin Books, 2006).

¹¹ D.G.E. Hall, *A History of South-East Asia*, (London: Macmillan Limited, 1994), 9.

dipindahkan dari Palembang ke Jambi. Saat itu, orang Melayu mengumumkan identitasnya sebagai Melayu.¹² Beberapa sumber lain menyatakan bahwa Kerajaan Melayu bukan penerus Sriwijaya, namun semasa, bahkan berdiri lebih awal, hingga ia ditaklukkan oleh Sriwijaya pada tahun 685 M. Kerajaan inilah yang dicatat dalam sejarah Dinasti T'ang sebagai Mo-lo-yeu, yang terletak di dekat Sungai Batang Hari¹³ Selain itu, menurut Fachruddin Saudagar yang meneliti isi prasasti *Amoghapasa* tahun 1286 M., terungkap bahwa Jambi adalah kawasan akhir kerajaan Budha yang tumbuh dan berkembang dalam tradisi Hindu-Budha yang diperkirakan masuk ke Jambi sejak awal abad ke-I M., melalui Sungai Batang Hari di pantai Timur Jambi.¹⁴ Tidak mengherankan kemudian budaya dan kehidupan sosial awal di Jambi kental dengan pengaruh Budha, yang dibuktikan dengan peninggalan umat Budha di daerah Jambi berupa candi, arca, dan situs purbakala.¹⁵

Berdasarkan keterangan di atas, dapat diketahui pengaruh Budha telah begitu kental dalam kehidupan masyarakat Jambi awal, bahkan Jambi merupakan tempat para biksu dari berbagai penjuru dunia dalam mempersiapkan ke jenjang pendidikan tinggi di pusat tradisi Budha India.¹⁶

Transformasi radikal budaya Budha Melayu Jambi ke Islam Melayu Jambi berproses kerajaan Melayu-Sriwijaya mengalami masa kemunduran di abad ke-10-11 M. Melemahnya Melayu-

¹² Zainal Kling, "Islam dan Kebudayaan Alam Melayu". <http://disparsenbudpora.banyuasinkab.go.id/tampung/dokumen/dokumen-20-46.pdf>. Diunduh tanggal 12 Oktober 2015: 1-39, 3-4.

¹³ Lihat Hanafiah Djohan, *Pulau Berhala, Orang Kaya Itam dan Si Gunjai: Suatu Mitos Ideologi dan Politik Jambi*, (Jambi: Pemda Tk. I Prov. Jambi dan Kanwil Depdikbud Prov. Jambi, 1992), 1.

¹⁴ Lihat Fachruddin Saudagar, *Perkembangan Sejarah Melayu Kuno di Jambi*, (Jambi: Pemda Tk. I Prov. Jambi dan Kanwil Depdikbud Prov. Jambi, 1992), 16-17.

¹⁵ Alfian, "Pertumbuhan Kerajaan Melayu Sampai Masa Aditya-warman". Diunduh dari http://eprints.unsri.ac.id/3682/1/3._Pertumbuhan_Kerajaan_Melayu_Sampai_Masa_Adityawarman.pdf. Diunduh tanggal 12 Oktober 2015.

¹⁶ Djafar Hasan, *Prasasti Masa Kerajaan Melayu Kuno dan Beberapa Permasalahan*, (Jambi: Pemda Tk. I Prov. Jambi dan Kanwil Depdikbud Prov. Jambi, 1992), 25

Sriwijaya hingga keruntuhannya menjadi awal berdiri, tegak dan berkembangnya kerajaan-kerajaan Islam di tanah Melayu¹⁷ Pembentukan kekuatan Islam di tanah Melayu (Indonesia) sebenarnya telah ada sejak abad ke-7-8 M, namun tidak terlihat oleh kejayaan Sriwijaya, Singosari ataupun Majapahit. Umat Islam ketika itu belum mampu mengkonsolidasi kekuatan politiknya. Memasuki abad ke-9 M, kekuatan politik Islam mulai kentara, terutama karena perlindungan Sriwijaya terhadap komunitas muslim Cina yang eksodus ke Kedah. Keadaan ini stagnan hingga memasuki abad ke-12 M., ketika kerajaan Sriwijaya mengalami kemunduran. Sementara itu, komunitas muslim di Baros saat itu justru berkembang pesat dan berhasil mendirikan kerajaan Samudra Pasai di pesisir Timur Aceh,¹⁸ yang menjadi jalur masuknya Islam di Jambi.

Ada yang menyatakan secara resmi Islam masuk ke Jambi ketika berada dalam kekuasaan Rangkayo Hitam (1500-1515). Ada juga yang menyatakan Islam masuk di Jambi secara resmi tahun 1615, saat pangeran Kedah Sultan Abdul Kahar, dinobatkan sebagai Raja Kesultanan Melayu Jambi yang pertama. Namun demikian penulis cukup setuju dengan keterangan yang mengungkapkan bahwa pada permulaan abad ke-8 salah seorang raja Melayu Jambi (Sri Maharaja Srinrawarman) telah menganut agama Islam, walaupun sejak itu hingga abad ke-12 terjadi masa *vacum* dakwah Islam di Jambi. Agama Islam madzhab Syafi'i baru berkembang pesat di Jambi, setelah daerah ini takluk di bawah kekuasaan Samudra Pasai (1285–1522). Sejak itulah Islam berpengaruh terhadap kebudayaan Melayu Jambi hingga menghasilkan budaya khas Melayu Jambi yang kemudian mendesak pengaruh Budha

¹⁷ Jalan masuk awal Islam di Asia Tenggara mulai terbuka pada masa Umar bin Khattab dan Usman bin Affan, di mana perkembangan Islam telah keluar jauh dari jazirah Arab, menuju Palestina, Mesir, Irak, dan terus berlanjut hingga ke Cina pada tahun 29 H. melalui utusan Khalifah Usman ke Cina tahun 651 H, yang dipimpin langsung oleh salah seorang sahabat Nabi Sa'ad bin abi Waqas. Yusuf Abdullah Puar, *Sejarah Islam di Indonesia*, (Bandung: Angkasa, 1984), 15.

¹⁸ Uka Tjandrasasmita (ed), *Sejarah Nasional Indonesia III*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1984), 2-3.

dalam kebudayaan Melayu Jambi. Alhasil, kebudayaan Melayu Jambi yang didominasi oleh unsur Islam dapat mempertahankan eksistensinya secara hegemonik sejak abad ke-15 hingga kini.¹⁹

Tinjauan historis di atas memperlihatkan bahwa tatanan sosial budaya Jambi sebenarnya sangat kosmopolit, ia bersifat terbuka dan menerima masukan dari budaya di sekitarnya.

Eksistensi Putra Daerah dan Pendatang di Provinsi Jambi

Konsepsi putra daerah memiliki *scope* yang beragam, bergantung pada perspektif seseorang melihatnya. Ia dapat bersifat khusus/eksklusif ataupun umum/inklusif. Namun dalam untuk kasus ini, penulis mengedepankan konsep putra daerah dalam pengertian yang inklusif, mengingat pemaknaan inilah yang masih melekat dalam benak warga Jambi, sebagaimana terlihat dalam berbagai literatur yang ada tentang putra daerah/penduduk pribumi Jambi.

Berdasarkan persepsi individual yang dikuatkan oleh legitimasi verifikatif lembaga berbadan hukum yang ada di Provinsi Jambi, yang dikatakan sebagai putra daerah adalah orang yang “terlahir” dan memiliki ikatan darah dengan komunitas awal yang ada di berbagai daerah di Provinsi Jambi. Walaupun kriteria ini masih membuka peluang untuk dikritisi, namun untuk tahap ini kriteria simplistik inilah yang akan digunakan.

Berdasarkan catatan yang dikeluarkan oleh beberapa sumber, dikatakan bahwa masyarakat Jambi merupakan masyarakat “heterogen” yang masih didominasi oleh masyarakat asli Jambi. Adapun masyarakat yang diakui sebagai masyarakat asli atau penduduk pribumi Jambi adalah: yakni Suku Melayu yang menjadi mayoritas di Provinsi Jambi. Selain itu juga ada Suku Kerinci, Suku Batin, Suku Penghulu, Suku Anak Dalam (Orang Rimbo), Suku Bajau, dan Suku Pindah. Selain itu juga ada pendatang seperti, etnis Minangkabau, Bugis, Batak, Jawa, dan Sunda, bahkan di Jambi juga

¹⁹ “Selayang Pandang Sepucuk Jambi Sembilan Lurah”, dalam <http://documents.tips/documents/selayang-pandang-kota-jambi-5617cc42a09a2.html>. Diakses 18 Mei 2016.

terdapat komunitas yang berasal dari luar negeri, terutama Arab, Cina, dan India yang telah menetap dan beranak pinak di Provinsi Jambi.²⁰

Penduduk pendatang di daerah Jambi ini dapat dibagi atas dua bagian yaitu: Penduduk yang berasal dari daerah lain, seperti Jawa, Minangkabau, Bugis, Palembang, Banjar, Batak, Sunda, dan lain-lain serta Penduduk pendatang yang terdiri dari orang-orang Asing, seperti India, Cina, Arab dan lain-lain.

Penduduk pendatang yang merupakan bagian dari bangsa Indonesia pindah ke Jambi, melalui jalur transmigrasi pemerintah maupun spontan. Orang Jawa dan Minangkabau tersebar di seluruh daerah Provinsi Jambi, orang Bugis dan orang Banjar banyak bertempat tinggal di kabupaten Tanjung Jabung dan Kota Jambi, orang Palembang banyak bertempat tinggal di Kotamadya Jambi, di Kabupaten Sarolangun Bangko, kabupaten Tanjung Jabung, Kabupaten Bungo Tebo dan Kabupaten Batanghari sedangkan orang-orang Sunda dan orang-orang Batak kebanyakan memilih tempat tinggal dalam Kotamadya Jambi.²¹

Sementara orang asing seperti Cina, Arab dan India umumnya bertempat tinggal di kota, terutama di kota Jambi dan ibukota kabupaten Tanjung Jabung. Mereka merupakan pedagang-pedagang yang ulet dan berhasil. Orang-orang asing ini sedikit sekali dijumpai di daerah-daerah Sarolangun Bangko dan di daerah Kabupaten Kerinci. Selain Arab, India dan Cina, juga ada orang asing Belanda, Perancis, Korea, Amerika yang datang ke Jambi umumnya mereka terdiri dari pengusaha dan karyawan perusahaan-perusahaan asing yang jumlahnya tidak banyak dan tidak menetap di daerah Jambi.

²⁰ Zulfikri Armada, "Suku Bangsa Provinsi Jambi", <http://catatanpamong.blogspot.co.id/2013/10/suku-bangsa-provinsi-jambi.html>. Diakses tanggal 25 September 2016.

²¹ Anonim, "Mengenal Suku Asli Provinsi Jambi", <https://djangki.wordpress.com/2012/10/18/mengenal-suku-asli-provinsi-jambi/>, 18 Oktober 2012, diunduh 28 Oktober 2016.

Walaupun demikian, konsepsi putra daerah dan pendatang seperti telah dijelaskan di awal, dapat meluas. Menurut Jefferey Sissons, istilah putra daerah atau penduduk pribumi sebenarnya “...has deep roots within colonial racism” merupakan produk dari rasisme kolonial,²² atau dalam kata lain menurut Michelle Harris, Bronwyn Carlson dan Evan Poata-Smith, merupakan ciptaan bangsa kolonial untuk mengkategorisasi masyarakat dalam sebuah pembatasan yang negatif dalam upaya mengalienasi suku pribumi. Kenyataan inilah yang kemudian terus berlanjut hingga menembus dimensi kehidupan keseharian di berbagai belahan dunia, yang lebih jauh digunakan dalam kriteria konteks keturunan, kewarganegaraan, dan akses politik, sosial serta yang lainnya.²³

Artinya konsep penduduk pribumi sebenarnya sarat dengan klaim keaslian (*claim indigeneity*), yang secara formal masih dapat dipertanyakan level batasannya, apakah berbasis pada komunitas masyarakat ataukah pada kesatuan negara. Mengingat jika menggunakan standar dewasa ini justru meluas hingga pada batasan istitusi negara. Dalam konteks inilah kategori keaslian penduduk pada hakikatnya memiliki dua sisi mata pedang, yang masih memiliki banyak perdebatan terutama menyangkut batasan penduduk pribumi, kedudukan warga kelas dua, berdarah campuran, dan juga masyarakat pendatang sebagaimana dikatakan oleh Sissons.²⁴

Karena itu pada satu sisi, dengan menggunakan kategori komunitas, penduduk pribumi merupakan warga pribumi atau putra daerah yang dikuatkan identitasnya berdasarkan ikatan darah dan rasa primordialisme, namun pada sisi lain dalam standar kenegaraan yang lebih luas penduduk pribumi merupakan semua warga negara didasarkan pada kewarganegaraan. Pandangan penduduk pribumi kiranya perlu ditempatkan dalam kerangka

²² Jefferey Sissons, *First People: Indigenous Cultures and Their Futures*, (London: Reaktion Books, 2005), 43.

²³ Lihat Harris, Carlson dan Poata-Smith, *The Political of Identity*, 1.

²⁴ Lihat Sissons, *First People*, 39.

kewarganegaraan, karena jika ditempatkan dalam batasan yang pertama, maka tidak jarang penduduk pribumi akan cenderung digambarkan sebagai warga kelas dua dan akan menemukan diri mereka sebagai penduduk yang termarginalkan. Hal ini terjadi merujuk pada fakta bahwa penduduk pribumi dalam batasan pertama cenderung bersifat eksklusif, kurang menerima masukan dan kemajuan dari luar, hingga mereka lambat atau cepat akan tergerus oleh kemajuan global yang bergerak dengan sangat cepat.

Hegemoni Sosial dan Politik Identitas di Provinsi Jambi

Persoalan putra daerah yang diatasmakan pembedaan identitas antara penduduk pribumi dan penduduk pendatang rentan untuk memunculkan hegemoni sosial dan juga politik identitas yang merupakan praktik diktator dan dominasi satu kelompok atas kelompok lainnya, dalam berbagai dimensi kehidupan, baik budaya, ekonomi, sosial, ataupun politi.²⁵ Termasuk dalam hegemoni adalah berbagai bentuk diskriminasi yang terhubung dengan praktik dominasi, penekanan, dan penguasaan, yang terjadi baik di level lokal, nasional, hingga antar bangsa, yang dilakukan terhadap satu kalangan (ras, agama, partai politik dan lain sebagainya) terhadap kalangan lain dengan menekankan pada kekuatan hubungan sosial-politik dan ekonomi dan juga kekuatan struktural birokratis. Sementara politik identitas adalah politik yang mengedepankan identitas kesukuan, agama, dan lain sebagainya, yang bermuara pada eksklusivisme dalam mendapatkan dan mempertahankan kuasa politik. Praktik politik identitas ini umumnya oleh kelompok mainstream, yang merupakan kelompok mayoritas yang diarahkan untuk “menekan” kalangan minoritas, baik dalam skala lokal, nasional, hingga antar bangsa.

²⁵ Lihat Davis Forgacs (Ed.), *The Gramsci Reader: Selected Writings 1916-1935*, (New York: New York University Press, 2000), 224 dan 194.

Hegemoni Sosial

Term hegemoni berasal dari bahasa Yunani Kuno "*hegemonia*" yang menunjukkan suatu dominasi satu entitas terhadap entitas lain. Konsep ini lebih jauh dikembangkan oleh sosiolog Antonio Gramsci,²⁶ untuk menunjukkan status adidaya dalam sistem atau merujuk pada posisi entitas dominan yang menguasai entitas lainnya kekuatan sosial ataupun politik yang dilakukan secara paksa.²⁷ Teori ini lebih jauh dikembangkan oleh Robert W. Cox, yang melekatkannya terhadap dominasi *status quo* kalangan yang lebih kaya dan lebih berkuasa terhadap kalangan lainnya yang inferior. Dalam proses ini kalangan elit dapat mendominasi pandangannya, baik secara moral, politik dan nilai budaya pada kalangan masyarakat umum melalui berbagai institusi sosial kemasyarakatan. Dalam konteks ini banyak pihak menempatkan hegemoni sebagai bentuk neokolonialisme melalui instrumen politik, sosial ataupun ekonomi, berdasarkan manipulasi hubungan tanpa menekankan sebuah badan yang bersifat superior, sementara imperialisme menekankan superioritas dalam berbagai bentuk kelembagaan atau badan.²⁸

Hegemoni dapat terjadi dalam berbagai bentuk hubungan baik dalam skala global, nasional, ataupun lokal dengan mengedepankan keunggulan ras, agama, partai politik dan lain sebagainya. Mengacu pada pemakaian ini, maka hegemoni sosial sebenarnya merupakan sebuah penodaan terhadap prinsip luhur bangsa Indonesia yang berlandaskan pada kebhinnekaan suku dan agama (*Bhinneka Tunggal Ika*). Pluralitas sebagai kenyataan yang tidak dapat dipungkiri akan ditolak dalam hegemoni yang mengedepankan keakuan.

Menyimak bahasan tentang hegemoni dalam hubungannya dengan posisi penduduk pribumi dan pendatang dalam kehidupan

²⁶ Sait Yilmaz, "State, Power, and Hegemony", dalam *International Journal of Business and Social Science*, Vol. 1, No. 3, December, 2010: 192-205, 194.

²⁷ Michele Barrett, "Ideology, Politics, Hegemony: From Gramsci to Laclau and Mouffe", dalam Slavoj Zizek, *Mapping Ideology*, (London: Verso, 1997), 239.

²⁸ Lihat Forgacs, *The Gramsci Reader*, 194.

sosial, maka dapat dikatakan bahwa secara kasat mata, kalangan pendatang tidak mengalami masalah sosial, penduduk pendatang justru memainkan peran penting di pusat-pusat perkotaan, sementara kebanyakan penduduk pribumi, kecuali Suku Kerinci dan Suku Melayu Jambi, menempati posisi yang agak termarginalkan, terutama Suku Anak Dalam yang masih terlihat enggan untuk mengakomodir kemajuan dalam kehidupan mereka yang lestari.

Walaupun demikian, jika diperhatikan secara jeli, maka akan terlihat adanya demarkasi antara putra daerah dan warga pendatang dalam kehidupan sosial, yang sekaligus menunjukkan belum terdapat sebuah perekat sosial yang solid yang mampu mempersatukan apa yang dikatakan sebagai putra daerah dan non putra daerah di Provinsi Jambi. Hal ini misalnya terjadi di Kabupaten Muaro Jambi. Berdasarkan keterangan Holison, Tokoh intelektual dan pemerhati Pilkada Muaro Jambi, diketahui bahwa beberapa daerah masih menerima isu kedaerahan, terutama di desa-desa tradisional yang memang memiliki ikatan kekerabatan yang kuat, biasanya isu kedaerahan ini justru dihembuskan oleh tokoh-tokoh yang berpengaruh di masyarakat.²⁹

Keterangan di atas memperlihatkan, walaupun isu kedaerahan tidak sampai memunculkan konflik sosial, namun isu tersebut masih mewarnai kehidupan sosial masyarakat yang tersebar di beberapa daerah di Provinsi Jambi, yang tidak jarang akan memunculkan sentimen primordialisme yang berujung pada hegemoni sosial. Hegemoni ini bahkan tidak hanya mendiskreditkan warga pendatang, namun juga beberapa suku yang sebenarnya termasuk dalam kategori penduduk pribumi Jambi.

Politik Identitas

Isu kedaerahan ataupun sentimen primordialisme dalam kehidupan masyarakat Jambi kentara jika dilihat dalam dimensi

²⁹ Holison, *Wawancara*, Jambi, 24 Oktober, 2016.

politik. Bangunan pola operasionalisasi politik identitas dapat ditemukan pada berbagai realitas yang terjadi pada masyarakat Jambi yang ditunjukkan dari banyaknya benturan kepentingan (*conflic of interest*) dan fenomena ego sektoral dengan menggunakan tiga instrumen kuasa utama, yaitu (a) kuasa pemerintahan; (b) kuasa agama; (c) kuasa hukum.

Pertama, politik identitas dalam kuasa pemerintahan dapat dilihat dari operasionalisasi politik identitas yang dimainkan dengan menggunakan kuasa pemerintahan yang dilantunkan dengan gaya yang cantik dan menawan, namun sangat efektif dan optimal. Hal ini terjadi sejalan dengan bergesernya pola sentralisasi menjadi desentralisasi, di mana pemerintah daerah diberikan kewenangan penuh dalam mengatur rumah tangganya berdasarkan pengakuan politik dalam pemilihan kepala daerah oleh konstituen di daerahnya masing-masing. Politik identitas ini ditampakkan dengan maraknya isu etnisitas dan gejala primordialisme yang diusung melalui isu “putra daerah” dalam menduduki jabatan publik, isu etnis asli dan anti pendatang, dan isu etnis mayoritas dan minoritas.³⁰

Di Provinsi Jambi operasionalisasi politik identitas dengan menggunakan kuasa pemerintahan ini ditemukan dalam beberapa kasus. Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan Ketua Kerukunan Keluarga Sulawesi Selatan (KKSS) dan sekaligus Ketua Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Tanjabtim), KH. As’ad Arsyad, yang menyatakan bahwa para tokoh di Tanjung Jabung Timur sepakat bahwa yang disebut sebagai putra daerah (penduduk pribumi) di Kabupaten Tanjung Jabung Timur adalah *pertama*; mereka yang lahir dan besar di

³⁰ Dirujuk dan disesuaikan dari Nuraida Muji Kurnia Eka Pratiwi, “Menguatnya Politik Identitas: Potensi atau Ancaman bagi Masa Depan Kebhinekaan Indonesia”, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember, 2012. <http://lembagailmiah.blogspot.co.id/2012/11/menguatnya-politik-identitas.html>. Diunduh tanggal 12 Juli 2016, 2-3.

Wilayah Tanjabtim, *kedua*; mereka yang berdomisi dan bekerja tetap di Tanjung Jabung Timur.³¹

Pada level atas, sebenarnya ada kesepahaman di antara para tokoh di Tanjung Jabung Timur tentang pentingnya untuk memperluas *scope* atau cakupan dari putra daerah, tanpa melihat asal daerah, dengan menetapkan bahwa orang yang lahir dan bekerja di Tanjung Jabung Timur termasuk sebagai putra daerah. Walaupun demikian, pada level *grass root* tampaknya kesepakatan di atas tidak berlaku sepenuhnya, masih terdapat pandangan negatif terhadap “warga pendatang” yang bahkan telah beranak pinak di Tanjung Jabung Timur. Hal ini terkait dengan klaim putra daerah yang senantiasa dikaitkan hanya kepada suku Melayu Jambi yang ada di Tanjung Jabung Timur, sementara yang lainnya dianggap sebagai warga pendatang, walaupun mereka lahir di Tanjung Jabung Timur. Dalam kondisi inilah, Arsyad menyatakan gugatannya terhadap pemahaman terhadap penduduk asli dan pendatang di Tanjung Jabung Timur, menurutnya daerah Tanjung Jabung Timur justru awalnya dibuka oleh orang Bugis. Sejarah mencatat bahwa Raja Ali Haji, merupakan orang Bugis yang sudah menjabat di kerajaan Malaka tahun 721. Engku Hamidah juga adalah keturunan Bugis, karena itu dapat dikatakan bahwa di daerah Tanjung Jabung Timur sebenarnya orang Bugis bisa jadi orang pertama yang tinggal di sana.³²

Hasil wawancara di atas mempertegas adanya sentimen kedaerahan yang menguatkan satu etnis atas yang lainnya, cenderung memunculkan sengketa terhadap klaim siapa putra daerah dan siapa bukan putra daerah. Semuanya terjadi karena keegoan warga yang menganggap diri sebagai pribumi, hingga berupaya menafikan peran bahkan eksistensi warga dari luar daerah yang dinilai tidak layak dan berhak untuk disebut sebagai putra daerah.

³¹ KH. As'ad Arsyad, *Wawancara*, Jambi, 12 Oktober 2016.

³² *Ibid.*

Realitas politik di atas memperlihatkan kuatnya dominasi satu etnis atas yang lainnya, sebuah isu berbasis SARA yang kemudian dipolitisir untuk kepentingan politik tertentu. Walaupun demikian, kenyataan itu sedikit dinegasi –bukan ditolak mentah-- oleh beberapa tokoh yang ada di Provinsi Jambi, khususnya di Kabupaten Tanjung Jabung Timur sendiri. H. Umar Mahmud, Asisten 3 Sekda Tanjabtim dan Wakil Ketua lembaga Adat Kab Tanjabtim, menyatakan bahwa bagi masyarakat Tanjabtim, isu non putra daerah tidak begitu direspon lagi, meskipun isu ini masih dimunculkan pada pemilihan kepala daerah atau kepala desa.³³ Pernyataan ini walaupun menegasi, namun tetap membenarkan adanya penggunaan isu kedaerahan dalam perpolitikan di Provinsi Jambi, hal ini dikuatkan kembali oleh Holison, seorang intelektual akademisi dan pemerhati masalah pemilihan kapala daerah (pilkada), yang menegaskan bahwa isu kedaerahan (primordialisme) memang selalu muncul di Pemilihan Kepala Daerah langsung. Mereka yang memunculkan isu ini merasa yakin akan dapat mendongkrak jumlah perolehan suara calon kepala daerah yang mereka usung, dan ternyata hal itu juga memang memberi pengaruh.³⁴

Mencermati realitas politik tersebut, jelas bahwa kehidupan politik di Provinsi Jambi, terutama di dua Kabupaten memperlihatkan masih kuatnya penggunaan sentimen daerah, melalui isu putra daerah dan non daerah dalam prosesi politik. Fakta ini diakui pula oleh Abdurrahman Sayuti, Kepala Kandepag Kab Muaro Jambi, sebagai hal yang memiliki muatan negatif. Menurutny, penguatan isu SARA bahkan telah berdampak pada hilangnya rasa persaudaraan di kalangan sesama muslim, mengingat yang dijadikan ukuran kemudian bukanlah persamaan akidah ataupun persamaan kemanusiaan sebagai hamba Allah, namun siapa saya dan siapa anda atau siapa calon mereka dan siapa

³³ H. Umar Mahmud, *Wawancara*, Jambi, 10 Oktober 2016.

³⁴ Holison, *Wawancara*, Jambi, 24 Oktober, 2016.

calon kita, ataupun “kita putra daerah” dan “mereka bukan putra daerah”.³⁵

Berbagai fenomena dan hasil wawancara di atas, menunjukkan telah terjadi penguatan politik identitas di Provinsi Jambi, yang dilihat oleh Agnes Heller sebagai politik yang memfokuskan pembedaan sebagai kategori utama, dengan mengangkat janji-janji politik tentang kebebasan, toleransi, dan kebebasan bermain (*free play*), walaupun hakikatnya justru ia sendiri telah memunculkan pola-pola intoleransi, kekerasan dan pertentangan antar etnis. Politik identitas dapat mencakup rasisme, bio-feminisme, environmentalisme (politik isu lingkungan) dan perselisihan etnis. Bila dilacak dari sejarah Indonesia politik identitas muncul dalam kecenderungan yang kuat pada etnisitas, agama dan ideologi politik. Dengan sifat yang demikian maka terkait dengan kondisi bangsa Indonesia yang multikulturalisme, politik identitas harusnya dapat menjadi bahan kajian yang menarik untuk ditelaah,³⁶ secara cermat sembari mencari sikap dan tindakan dalam melihatnya.

Kedua, politik identitas atas nama agama, yang umumnya dilakukan oleh kelompok *mainstream*, yaitu kelompok agama mayoritas, dengan niat “menyingkirkan” kaum minoritas yang dianggapnya “menyimpang” atau “menyeleweng”. Bersamaan dengan ini munculnya gerakan-gerakan radikal atau semi radikal yang “berbaju” Islam di Indonesia. Mereka memiliki *partner* dan *funding* di negara lain, yang juga memiliki gerakan anti-demokrasi, anti-pluralisme, hingga anti-nasionalisme. Secara ideologis, mereka mendapat inspirasi dan pengaruh dari gerakan Islamis dan Salafi yang semula berpusat di beberapa negara-negara Arab, kemudian dengan kecepatan tinggi menyebar ke seluruh dunia.³⁷

³⁵ Abdurrahman Sayuti, *Wawancara*, Jambi, 17 Oktober 2016.

³⁶ Lihat karya Masykuri Abdillah, *Demokrasi Di Pesimpangan Makna: Respons Intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*, (Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1999).

³⁷ Disesuaikan dari Pratiwi, “Menguatnya Politik Identitas: Potensi atau Ancaman bagi Masa Depan Kebhinekaan Indonesia”, 2.

Kasus di Provinsi Jambi menunjukkan bahwa politik identitas atas nama agama ini dapat terjadi dalam internal pemeluk agama dengan mengatasnamakan aliran keagamaan tertentu dan juga antar umat beragama dengan melakukan pelabelan terhadap penganut agama lain dengan cap yang negatif, semisal “kafir”, secara sadar ataupun tidak sadar, secara langsung ataupun tidak langsung.

Di Kota Jambi pandangan negatif mayoritas muslim terhadap non-muslim masih kerap muncul, walaupun tidak sampai berujung pada konflik, namun yang terbangun kemudian adalah toleransi yang semu. Beberapa kasus memperlihatkan kenyataan ini, terlepas dari polemik yang ada. Umat Kristiani di beberapa daerah di kota Jambi terlebih di Kabupaten Jambi, masih terlihat sulit untuk mendirikan rumah ibadah, kasus penolakan pendirian gereja misalnya pernah terjadi di Penyengat Rendah, di mana masyarakat setempat menolak pendirian gereja Huria Batak Kristen Protestan (HKBP) Syalom Aurduri, yang kejadian dikuatkan oleh penyegelan yang tertuang dalam surat Walikota tanggal 14 Desember 2011.³⁸

Pada Era Walikota Jambi H. Syarif Fasya kembali ditegaskan akan membongkar paksa bangunan gereja itu karena dinilai belum memiliki IMB. Batas waktu yang diberikan Pemkot Jambi hingga 14 November 2015. Jika hingga tanggal 14 November 2015 bangunan HKBP Syalom Aurduri tak dibongkar, maka Sat Pol PP kota Jambi akan melakukan pembongkaran paksa.³⁹ Hal ini diperkuat oleh putusan MK akhir tahun 2015, yang menetapkan agar bangunan gereja HKBP Syaloom Aur Duri yang terbengkalai diminta dibongkar.⁴⁰

³⁸ Jogi Sirait, “Kemelut Berlarut Pembangunan Gereja, *GATRA*, Nomor 15, Kamis 16 Februari 2012. <http://arsip.gatra.com/2012-02-13/majalah/rubrik.php?id=45>.

³⁹ Rosenman Manihuruk, “Pemkot Jambi Bakal Bongkar Paksa Gereja HKBP Syalom Aurduri Jambi”, <http://rosenmanmanihuruk.blogspot.co.id/2015/11/pemkot-jambi-bakal-bongkar-paksa-gereja.html>, 2 November, 2015. Diunduh 12 November 2016.

⁴⁰ Berita Satu. com, “Gereja Disegel, Ratusan Umat HKBP Beribadah di Kantor Wali Kota Jambi”, <http://www.beritasatu.com/nasional/347900-gereja-disegel-ratusan-umat-hkbp-beribadah-di-kantor-wali-kota-jambi.html>.08Feb-ruari 2016. Diunduh 12 November 2016.

Dalam perspektif non muslim, kejadian di atas menyebabkan pembangunan gereja di sejumlah daerah menjadi kemelut yang berlarut-larut. Di lain pihak, pemerintah daerah cenderung pro-masyarakat mayoritas dan tidak bisa bertindak tegas. Dalam kenyataan ini beberapa pihak melihat kasus di atas dan beberapa kasus lainnya sebagai bentuk dari politik identitas atas nama agama atau bahkan hukum.

Walaupun demikian, Pemkot Jambi tampaknya tidak sepenuhnya mengedepankan politik identitas, terbukti bahwa baru-baru ini Pemkot Jambi justru mengeluarkan aturan yang sangat toleran terhadap semua agama. Diberitakan bahwa Walikota Jambi H. Syarif Fasha, telah meninjau pemakaman umum (TPU) umat Tionghoa (kuburan cina) di Jalan Patimura Kelurahan Rawasari Kecamatan Alam Barajo, pada hari Rabu, 23 Maret 2016, lalu, dengan mengikutsertakan Kepala Dinas Kebersihan, Pertamanan dan Pemakaman Moncar, serta Camat setempat. Tujuannya adalah untuk memastikan bahwa TPU umat Tionghoa tersebut masuk dalam program membersihkan kuburan yang dilakukan Pemerintah kota Jambi tahun 2016 ini. Selain itu, kunjungan tersebut dimaksudkan untuk meninjau persiapan pemakaman itu dalam menyambut ritual ziarah kubur (leluhur) umat Tionghoa atau yang dikenal dengan ritual Cengbeng yang setiap tahunnya diselenggarakan di pemakaman tersebut.

Saat melihat kondisi pemakaman yang banyak ditumbuhi rumput dan ilalang tersebut, Walikota Fasha langsung menginstruksikan Kepala Dinas Kebersihan, Pemakaman dan Pertamanan, agar membersihkan seluruh rumput dan semak yang tumbuh subur di pemakaman tersebut. Ia juga menginstruksikan agar dinas tersebut memasang beberapa titik lampu di dalamnya.⁴¹

⁴¹ Ita, "Jejak Kasus Hebat, Sambut Ritual Cengbeng, Walikota Jambi Intruksikan DKPP Bersihkan TPU Tionghoa", 30 March 2016, dilansir dari

Kenyataan ini justru menunjukkan bahwa Pemkot Jambi yang dimotori oleh duet kepemimpinan H. Syarif Fasha dan Abdullah Sani, menempatkan keragaman yang dimiliki kota Jambi sebagai potensi positif dalam membangun kota Jambi. Semangat masyarakatnya yang majemuk dengan berbagai macam agama, dan beraneka ragam suku tersebut memberikan kesempatan kepada Pemerintah kota Jambi untuk mewujudkan kelangsungan kota yang harmoni. Di mana Pemerintah kota Jambi mengayomi dan memberi tempat yang sama bagi semua agama, suku dan ras. Perlakuan yang sama di antaranya ditunjukkan Pemerintah kota Jambi dalam memfasilitasi berbagai kegiatan keagamaan dan keragaman budaya termasuk perayaan hari-hari besar semua agama yang ada di kota Jambi.

Ketiga, politik identitas melalui kuasa hukum. Ranah ini merupakan paduan antara wilayah negara dan agama, karena masing-masing memiliki aturannya sendiri. Pada sisi ini, politik identitas beroperasi dengan cara pembagian kekuasaan, di mana identitas kelompok akan memasukkan kepentingan identitasnya secara partikular. Namun demikian, hal ini tidak akan terjadi jika kepentingan dari politik identitas etnis minoritas dapat terjembatani melalui pengakuan hak-haknya untuk berpartisipasi di wilayah pembuatan keputusan hukum secara bersama.⁴²

Di Provinsi Jambi yang notabenehnya dikuasai oleh perwakilan mayoritas ini, politik identitas melalui kuasa hukum tampil dalam keragaman hegemoni sosial. Hal ini misalnya dialami oleh Orang Rimbo, sebagai komunitas adat hak-hak kewargaannya yang kian hari kian terancam. Ancaman bagi kepunahan masyarakat adat bisa datang dari beragam faktor, baik faktor internal ataupun eksternal. Faktor eksternal di antaranya muncul dari berbagai bentuk

<http://www.jejakkasus.info/2016/03/sambut-ritual-cengbeng-walikota-jambi>. html. Diunduh Tanggal 24 November 2016.

⁴² Pratiwi, *Menguatnya Politik Identitas: Potensi atau Ancaman bagi Masa Depan Kebhinekaan Indonesia*, 3.

kekerasan yang dilakukan oleh pemerintah ataupun korporasi, sementara faktor internal berbentuk transformasi sosial yang dialami oleh Orang Rimbo.

Satu hal yang menarik dalam konteks ini adalah bahwa komunitas Orang Rimbo sebagai komunitas adat minoritas di Provinsi Jambi justru mengalami dampak yang besar dari kuasa negara yang banyak melakukan dikte terhadap pola kehidupan mereka. Pemerintah Provinsi Jambi sebagai aparatur negara memang tidak dapat menjamin kelestarian masyarakat adat, apalagi menjadikannya semacam “museum”, karena hal itu menjadi hak dari komunitas adat itu sendiri, apakah nanti mau berubah atau terus mempertahankan keaslian kultur mereka,⁴³ namun ada beberapa kebijakan “baik” pemerintah justru dapat berakibat desktruktif terhadap struktur adat Orang Rimbo.

Berdasarkan hasil diskusi dwi-bulanan Yayasan Interseksi diketahui bahwa keberadaan masyarakat adat (Orang Rimbo) yang seringkali masih dilihat sebagai “masyarakat terasing” perlu mendapat perhatian serius dari negara agar mereka memiliki akses yang baik terhadap layanan pemerintah. Salah satu adalah dalam hal pendidikan. Seharusnya negara dapat membuat guru masuk ke dalam hutan, bukan sebaliknya, memaksa mereka untuk keluar. Karena mereka adalah warga negara Indonesia yang juga berhak mendapat pelayanan publik yang diselenggarakan oleh pemerintah. Namun hal yang terjadi selama ini justru sebaliknya. Hal ini dibenarkan oleh Adi Prasetijo yang menyampaikan presentasinya mengenai “*Alternative Strategies and Actions in Social Movement Againsts Hegemony by Orang Rimba of Jambi, Sumatra*”. Menurut Adi, Orang Rimbo selama ini telah menghadapi hegemoni negara,⁴⁴ yang dalam hal ini tentu saja direpresentasikan oleh Pemerintah Provinsi Jambi.

⁴³ Stephanie Djohar, “Orang Rimba, Catatan Diskusi Interaksi”, <http://interseksi.org/bimonthly-discussion/orang-rimba/.04> November 2014, diunduh 27 Agustus, 2016.

⁴⁴ Djohar, “Orang Rimba, Catatan Diskusi Interaksi”.

Hegemoni pemerintah yang berbalut kuasa hukum ini terjadi seiring dengan perubahan orientasi dunia yang melihat dunia dari sebuah sumber daya yang dimiliki, dalam konteks inilah *Orang Rimbo* mengalami '*displacement*'. Secara sosial-politik, mereka dinamakan Komunitas Adat Terpencil (KAT) atau *indigenous people*, sebuah istilah yang diperuntukkan bagi komunitas yang memiliki sistem sosial-politik yang rapuh. Gaya hidup mereka yang nomaden juga telah diidentikkan dengan gaya hidup yang abnormal. Beragam tekanan terhadap KAT muncul di banyak tempat, bahkan hingga ke ranah-ranah privat seperti urusan agama dan keyakinan. Fenomena "pemaksaan" untuk berpindah agama ke dalam agama yang diakui negara, misalnya menjadi masalah bagi beberapa KAT di sejumlah tempat, seperti yang terjadi pada Orang Wana di Sulawesi Selatan, Kaharingan di Kalimantan, Sunda Wiwitan di Jawa Barat. Demikian juga dari sisi ekonomi, negara dalam banyak kasus telah membuat KAT mengalami '*displacement*' sehingga memunculkan masalah-masalah baru. Seperti berubahnya pola hidup mereka ketika tinggal secara menetap. Mereka membutuhkan hal-hal untuk bertahan hidup seperti air bersih dan pendapatan tetap.

Karena berbagai persoalan tersebut, sejumlah KAT termasuk Orang Rimbo di Jambi terus melakukan perlawanan. Tindakan perlawanan mereka dari yang bersifat simbolik hingga beralih kepada kegiatan yang bersifat '*social banditry*' yang dipandang negara adalah suatu tindakan kriminal. Beberapa contoh kriminalisasi dan stigmatisasi misalnya seperti menciptakan tabu untuk membentengi mereka, memblokade jalan, mencuri makanan, demonstrasi dan mengklaim lahan. Namun hal-hal ini ada yang mereka pelajari dari para orang luar seperti tindakan blokade jalan yang dilakukan oleh perusahaan kelapa sawit yang memang sudah ada di hutan tempat mereka tinggal. Namun secara umum dapat dikatakan bahwa perjuangan dan perlawanan yang dilakukan Orang Rimbo sebenarnya sebagai upaya dehegemonisasi untuk mempertahankan identitas mereka, baik dari hegemoni negara

maupun saat mereka harus berhadapan dengan pihak-pihak perusahaan di dalam kawasan cagar alam di Jambi.⁴⁵

Hal di atas menunjukkan bahwa telah terjadi politik identitas dan dalam batas tertentu hegemoni sosial terhadap Orang Rimbo. Sebagaimana komunitas adat yang terpencil, mereka memang menarik untuk dikaji, terutama dalam kaitannya dengan hak-hak kewargaannya yang kian hari kian terancam. Dalam konteks inilah justru hegemoni sosial dan praktik politik identitas mestinya dijauhkan untuk dapat memberikan kebebasan bagi tiap masyarakat mengekspresikan dirinya secara unik tanpa harus kehilangan pengakuan sebagai bagian dari identitas komunal masyarakat yang lebih luas.

Ketiga pola operasionalisasi politik identitas di atas jelas bermuara pada kuasa mayoritas, yang dalam kacamata tertentu cenderung dianggap telah mendistorsi wawasan kebangsaan yang secara perlahan dibangun oleh bangsa Indonesia. Menguatnya gejala politik identitas terutama akhir-akhir ini, lebih banyak dipengaruhi kepentingan politik praktis. Sehingga dasar kemajuan dalam ikatan persatuan dan kesatuan sebagai modal dasar tumbuhnya nasionalisme tidak pernah tuntas dalam proses pendefinisian tentang identitas ke-Indonesiaan. Dampaknya pada bangsa ini akan selalu muncul fenomena merebaknya respon-respon kultural di sejumlah daerah dengan persoalan baru terkait munculnya konflik antar agama, etnisitas, maupun kewarganegaraan. Konflik-konflik yang sama juga akan terjadi di tengah masyarakat, disebabkan beberapa kelompok masyarakat lebih mengedepankan identitas sempitnya, akibatnya kohesi sosial pun terganggu. Dalam kondisi ini, *Bhinneka Tunggal Ika* sebagai salah satu pilar kehidupan berbangsa dan bernegara yang mampu menyokong keutuhan bangsa akan semakin terancam keberadaannya.⁴⁶

⁴⁵ Djohar, "Orang Rimba, Catatan Diskusi Interaksi".

⁴⁶ Pratiwi, "Menguatnya Politik Identitas", 3.

Walaupun demikian, beberapa ahli mengembangkan pandangan yang agak berbeda. Syafii Ma'arif misalnya pernah menyatakan bahwa politik identitas dalam bentuk apa pun tidak akan membahayakan keutuhan bangsa dan negara ini di masa depan, selama cita-cita para pendiri bangsa tentang persatuan dan integrasi nasional, semangat Sumpah Pemuda yang telah melebur sentimen kesukuan, dan Pancasila sebagai dasar filosofi negara tidak dibiarkan tergantung di awang-awang, tetapi dihayati dan dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Sehingga jelas bahwa politik identitas tidak selalu dipandang sebagai ancaman terhadap keutuhan bangsa, melainkan ia dapat menjadi sebuah potensi untuk meningkatkan persatuan dan kesatuan bangsa melalui kemampuan untuk mengaplikasikan semangat *Bhinneka Tunggal Ika* dalam menjalankan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Terlepas dari dua penilaian di atas, politik identitas dalam kerangka kebhinekaan adalah tema yang sangat menarik untuk terus digumuli dalam realitas kekinian Indonesia. Tema tersebut tampak "*sexy*" dan strategis untuk dikemukakan sebagai wacana ilmiah, karena tidak saja bersentuhan dengan masa depan bangsa Indonesia, akan tetapi juga menantang pengerahan energi pikir guna mencari dan menemukan formasi yang tepat dalam menempatkan dan mendialogkan berbagai perbedaan yang ada dalam konteks Indonesia yang memiliki pluralitas dalam identitas. Harapannya tentu saja segera ditemukan solusi terbaik dalam mengatasi tensi antara mayoritas dan minoritas yang menjadi akar politik identitas.

Penutup

Dinamika penguatan politik identitas putra daerah dalam kehidupan sosial-politik di Provinsi Jambi dewasa ini menunjukkan memudarnya nilai-nilai kosmopolitanisme yang pernah hidup subur dalam kehidupan masyarakat Jambi masa lalu. Sentimen kedaerahan dengan menggunakan isu "putra daerah" dan juga dikotonomi antara penduduk asli atau pribumi dengan penduduk

pendatang jelas menjadi ancaman terhadap nilai kosmopolitanisme di Jambi.

Hegemoni sosial-politik putra daerah menjadi dilema tersendiri terhadap budaya kosmopolitan di Provinsi Jambi, karena ia pada satu sisi akan melestarikan budaya asli dan kepentingan putra daerah, namun pada sisi lain akan berimbas pada kemunduran budaya dan gagalnya pembentukan budaya yang kosmopolit. Selain itu ia juga akan berdampak pada munculnya fenomena merebaknya respon-respon kultural di sejumlah daerah dengan persoalan baru terkait konflik antar agama, etnisitas, maupun kewarganegaraan. Untuk itu budaya kosmopolitan idealnya dapat kembali ditumbuhkan sebagai solusi dalam menghapus hegemoni sosial politik yang terjadi di Provinsi Jambi, karena ia merupakan suatu sikap yang perlu dimunculkan untuk menumbuhkan rasa kesatuan yang kuat dalam kehidupan manusia. Dalam konteks ini manusia dilihat dalam kesatuan yang utuh, terbuka dan dapat menerima budaya lain, hingga dapat mempertemukan antar entitas budaya.

Daftar Pustaka

- Abdillah, Masykuri. *Demokrasi di Pesimpangan Makna: Respons Intelektual Muslim Indonesia terhadap Konsep Demokrasi (1966-1993)*. Yogyakarta: Tiara Wacana Yogya, 1999.
- Alfian. "Pertumbuhan Kerajaan Melayu Sampai Masa Adityawarman". Diunduh dari http://eprints.unsri.ac.id/3682/1/3._Pertumbuhan_Kerajaan_Melayu_Sampai_Masa_Adityawarman.pdf. Diunduh 12 Oktober 2015.
- Anonim. "Mengenal Suku Asli Provinsi Jambi", <https://djangki.wordpress.com/2012/10/18/mengenal-suku-asli-provinsi-jambi/>, 18 Oktober 2012. Diunduh 28 Oktober 2016.

- Anonim. "Selayang Pandang Sepucuk Jambi Sembilan Lurah", <http://documents.tips/documents/selayang-pandang-kota-ambi-5617cc42a09a2.html>. Diakses 18 Mei 2016.
- Appiah, Kwame Appiah. *Cosmopolitanism Ethics in a World of Strangers*. London: Penguin Books, 2006.
- Armada, Zulfikri. "Suku Bangsa Provinsi Jambi", <http://catatanpamong.blogspot.co.id/2013/10/suku-bangsa-provinsi-jambi.html>. Diakses tanggal 25 September 2016.
- Berita Satu. com, "Gereja Disegel, Ratusan Umat HKBP Beribadah di Kantor Wali Kkota Jambi", <http://www.beritasatu.com/nasional/347900-gereja-disegel-ratusan-umat-hkbp-beribadah-di-kantor-wali-kota-jambi.html>. 08Feb-ruari 2016. Diunduh 12 November 2016.
- Choudhury, Tufyal. *The Role of Muslim Identity Polititics in Radicalisation (a Study in Progress)*. London: Departement Communities and Local Government , 2007.
- Dijk, Teun A. Van. "Analyzing Racism Through Discourse Analysis: Some Methodological Reflections", <http://www.discourses.org/OldArticles/Analyzing%20racism%20through%20discourse%20analysis.pdf>,97. Diakses 18 Mei 2016.
- Djohan, Hanafiah. *Pulau Berhala, Orang Kaya Itam dan Si Gunjai: Suatu Mitos Ideologi dan Politik Jambi*. Jambi: Pemda Tk. I Prov. Jambi dan Kanwil Depdikbud Prov. Jambi, 1992.
- Djohar, Stephanie. "Orang Rimba, Catatan Diskusi Interaksi", <http://interseksi.org/bimonthly-discussion/orang-rimba/04> November 2014. Diunduh 27 Agustus, 2016.
- Forgacs, Davis (Ed.). *The Gramsci Reader: Selected Writings 1916-1935*. New York: New York University Press, 2000.
- Gupta, Akhil & James Ferguson. "Beyond "Culture": Space, Identity, and the Politics of Difference." *Cultural Antropology*, Vol. 7, No. 1 1992,
- Haboddin, Muhtar. "Menguatnya Politik Identitas di Ranah Lokal." *Jurnal Studi Pemerintah*, Vol. 3, No. 1, Februari, 2014: 109-126.

- Hall, D.G.E. *A History of South-East Asia*. London: Macmillan Limited, 1994.
- Harris, Michelle, Bronwyn Carlos & Evan Poata-Smith (Eds.). *The Politics of Identity: Emerging Indigeneity*. Sydney: UTSePress, 2013.
- Hasan, Djafar. *Prasasti Masa Kerajaan Malayu Kuno Dan Beberapa Permasalahan*. Jambi: Pemda Tk. I Prov. Jambi dan Kanwil Depdikbud Prov. Jambi, 1992.
- Ita. Jejak Kasus Hebat, "Sambut Ritual Cengbeng, Walikota Jambi Intruksikan DKPP Bersihkan TPU Tionghoa", 30 March 2016, dilansir dari <http://www.jejakkasus.info/2016/03/sambut-ritual-cengbeng-walikota-jambi.html>. Diunduh Tanggal 24 November 2016.
- Kauffman, LA. "The Anti-Politics of Identities." *Socialist Review*, No. 1 Vol. 20 (Jan-March), 1990.
- Kling, Zainal. "Islam dan Kebudayaan Alam Melayu"., Diakses dari <http://disparsenbudpora.banyuasinkab.go.id/tampung/dokumen/dokumen-20-46.pdf>. Diunduh tanggal 12 Oktober 2015.
- Maarif, Ahmad Syafi'i. *Politik Identitas dan Masa Depan Pluralisme Kita*. Jakarta: Democracy Project, 2012.
- Manihuruk, Rosenman. "Pemkot Jambi Bakal Bongkar Paksa Gereja HKBP Syalom Aurduri Jambi", <http://rosenmanmanihuruk.blogspot.co.id/2015/11/pemkot-jambi-bakal-bongkar-paksa-gereja.html>., 2 November, 2015. Diunduh 12 November 2016.
- Pratiwi, Nuraida Muji Kurnia Eka. "Menguatnya Politik Identitas: Potensi atau Ancaman bagi Masa Depan Kebhinekaan Indonesia", Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Jember, 2012. Diunduh dari <http://lembagailmiah.blogspot.co.id/2012/11/menguatnya-politik-identitas.html>. tanggal 12 Juli 2016, 2-3.
- Puar, Yusuf Abdullah. *Sejarah Islam di Indonesia*. Bandung: Angkasa, 1984.

- Saudagar, Fachruddin. *Perkembangan Sejarah Melayu Kuno Di Jambi*. Jambi: Pemda Tk. I Prov. Jambi dan Kanwil Depdikbud Prov. Jambi, 1992.
- Sirait, Jogi. "Kemelut Berlarut Pembangunan Gereja." *GATRA*, Nomor 15, Kamis 16 Februari 2012.
- Sisson, Jefferey. *First People: Indigenous Cultures and Their Futures*. London: Reaktion Books, 2005.
- Tjandrasasmita, Uka (ed). *Sejarah Nasional Indonesia III*. Jakarta: Balai Pustaka, 1984.
- Yilmaz, Sait. "State, Power, and Hegemony." *International Journal of Business and Social Science*, Vol. 1, No. 3, December, 2010.
- Zizek, Slavoj. *Mapping Ideology*. London: Verso, 1997.